

ANALISIS DEMOGRAFI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS KKNIDALAM PERENCANAAN SDM

Hadi Supratikta^{1*}, Muhammad Arfani S.S.², Ike Rachmawati³, Tio Hanrio⁴

Universitas Pamulang, Indonesia

Email: supratikta@gmail.com, arfa2181@gmail.com, ikebungo99@gmail.com,
tiohanrio00@gmail.com

Abstrak

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam pendidikan tinggi. KKNI, sebagai kerangka pencapaian pembelajaran, menyatukan pengalaman kerja dan pendidikan formal, nonformal, atau informal. Pembahasan mengenai landasan teori, regulasi, ruang lingkup, dan konsep dasar KKNI, sejarah perkembangannya, serta hasil dan pembahasan terkait produktivitas tenaga kerja Indonesia di kawasan Asia. KKNI diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, mendapatkan pengakuan internasional, dan memperkuat daya saing nasional.

Kata Kunci : KKNI , Produktivitas Tenaga Kerja

Abstract

Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) in higher education. KKNI, as a framework for learning achievement, integrates work experience and formal, non-formal or informal education. The article explains the theoretical basis, regulations, scope, and basic concepts of KKNI, the history of its development, as well as results and discussions related to Indonesian labor productivity in the Asian region. KKNI is expected to improve the quality of education, gain international recognition, and strengthen national competitiveness.

Keywords : KKNI , Labor Productivity

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif. Dalam mengembangkan peserta didik secara aktif dapat dikembangkan melalui potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta *soft skill* yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.

Sementara itu, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, magister, doctor, profesi dan program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat penting untuk keberlangsungan dan pencapaian pendidikan tinggi. Lulusan yang tidak memiliki keterampilan akan kurang bersaing. Untuk itu, semua orang di dunia akademik harus memahami betapa pentingnya keterampilan yang dimiliki baik oleh dosen maupun mahasiswa. Dengan demikian, kurikulum perguruan tinggi harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. KKNI

bertujuan untuk menyelaraskan berbagai tingkat kualifikasi pendidikan, mulai dari pendidikan formal hingga non-formal, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan dan kompetensi lulusan. KKNI diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan Indonesia di tingkat global serta memperkuat koneksi antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja.

KKNI adalah kerangka pencapaian pembelajaran yang dapat menyetarakan pengalaman kerja atau pendidikan formal, nonformal, atau informal. Ini memungkinkan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai industri. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah dasar di baliknya.

Diharapkan adanya KKNI ini akan mengubah perspektif orang tentang kemampuan dosen dan mahasiswa. Tidak lagi mengacu pada ijazah, tetapi pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan pendidikan formal dan nonformal.

KKNI merupakan respons terhadap kebutuhan akan standar kualifikasi yang jelas dan terukur di semua tingkat pendidikan tinggi di Indonesia. Sebelum adanya KKNI, terdapat kecenderungan bahwa standar kualifikasi dan kompetensi lulusan dari berbagai program studi dan perguruan tinggi cenderung bervariasi secara signifikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam menilai kualitas lulusan, baik oleh pihak industri maupun institusi pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, KKNI menjadi landasan yang penting untuk memastikan bahwa setiap lulusan pendidikan tinggi memiliki kualifikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem pendidikan dan pelatihan nasional Indonesia membentuk KKNI, yang merupakan perwujudan kualitas dan jati diri bangsa Indonesia. KKNI digunakan untuk menyandingkan dan menyetarakan pembelajaran antara pendidikan dan pelatihan kerja. Ini adalah proses menyandingkan dan menyetarakan pembelajaran antara pendidikan dan pelatihan kerja atau pengalaman kerja..

METODE

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, mengatur KKNI. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimaksudkan untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja untuk memberikan pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai industri.

Menyusul diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, peraturan terkait pelaksanaan KKNI diatur lebih lanjut dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Kejuruan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Penerapan Kerangka Kualifikasi

1. Ruang Lingkup dan Fungsi

Sangat penting untuk segera mempersiapkan lulusan yang berkualitas dan berpengalaman dalam pengembangan Kerangka Kualifikasi ASEAN. KKNi adalah salah satu solusinya. Ke depan, keberadaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Prestasi Belajar (CP) menjadi penting. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus segera merancang studinya sedemikian rupa sehingga mudah untuk menentukan pilihan mata kuliah dan latihannya.

KKNi adalah kerangka kualifikasi yang mengatur jalur pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Ruang lingkup KKNi mencakup semua jenis pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang terjadi di dalam atau luar negeri, yang dapat diakui dan diukur secara kualitatif dan kuantitatif.

KKNi merupakan salah satu aspek penting pendidikan tinggi dalam persaingan internasional. Untuk dapat diterima di pasar, lulusan harus memiliki kualifikasi yang unik, kompeten dan profesional. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk memperhatikan KKNi ketika mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum.

Menurut Ir. Hudiyo Firmanto M.Sc., Ph.D (2016) juga menyampaikan bahwa persaingan global yang ketat menuntut adanya perbaikan pada pendidikan tinggi Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kebangkitan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing internasional.

Fungsi KKNi dalam pendidikan tinggi meliputi beberapa hal, antara lain :

1. **Pengakuan Kualifikasi:** KKNi memfasilitasi pengakuan kualifikasi pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini memungkinkan adanya kesetaraan antara kualifikasi yang diperoleh di dalam negeri dengan kualifikasi yang diperoleh di luar negeri.
2. **Penjaminan Mutu:** KKNi membantu dalam menjamin mutu pendidikan tinggi dengan menyusun standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh setiap program studi.
3. **Mobilitas Pendidikan:** KKNi memungkinkan mobilitas pendidikan yang lebih luas dengan memfasilitasi transfer kredit antar program studi dan perguruan tinggi.
4. **Keterkaitan dengan Dunia Kerja:** KKNi memastikan bahwa lulusan pendidikan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

KKNi memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kesetaraan kualifikasi, peningkatan mutu pendidikan tinggi, mobilitas pendidikan, dan keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja di Indonesia. Oleh karena itu, implementasi KKNi perlu diperhatikan dengan seksama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan diberlakukannya pasar bebas ASEAN (MEA), Indonesia berada dalam situasi pergerakan bebas jasa dan pergerakan bebas tenaga kerja terampil. Tenaga kerja wajib mempunyai kualifikasi regional karena mempunyai keterampilan dan pengetahuan atau keterampilan khusus dalam profesinya (tenaga kerja terampil).

Penting untuk mempertimbangkan bersama-sama standarisasi capaian pembelajaran setiap kurikulum dan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, khususnya sesuai standar ASEAN.

2. Konsep Dasar Teori

Konsep dasar teori Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mengacu pada sistem yang mengatur dan mengelola kualifikasi pendidikan dan pelatihan di Indonesia. KKNI bertujuan untuk menyelaraskan dan memfasilitasi pengakuan, akumulasi, transfer, dan pengembangan kualifikasi agar sesuai dengan standar nasional. KKNI juga memungkinkan perbandingan dan pengakuan kualifikasi antar negara.

KKNI didasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas, fleksibilitas, transferabilitas, dan keadilan. Ini berarti bahwa KKNI dirancang untuk memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pendidikan dan pelatihan, memberikan fleksibilitas dalam mencapai kualifikasi, memfasilitasi transfer kredit antar program dan institusi, serta memastikan kesetaraan dan keadilan dalam pengakuan kualifikasi.

Implementasi KKNI melibatkan proses pengembangan dan penetapan standar kompetensi, penyusunan kerangka kualifikasi, sertifikasi kompetensi, akreditasi program, dan pengakuan kualifikasi. Selain itu, KKNI juga menekankan pentingnya pengembangan sistem jaminan mutu untuk memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

KKNI menjadi landasan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia serta memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dan pendidik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan ke depan yang dihadapi sektor pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia, pada akhir tahun 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud melalui kegiatan yang dikembangkan di Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (BELMAWA), mengambil inisiatif yang sejalan dengan gagasan Badan Kepegawaian Pembinaan dan Pelatihan Guru Kemennakertrans untuk mengembangkan kerangka kualifikasi tingkat nasional, yang kemudian disebut Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI.

Dalam pengembangan konsep dasar KKNI, diperlukan unit-unit yang berada di bawah administrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Migrasi, serta organisasi industri terkait lainnya, serikat pekerja, lembaga atau lembaga sertifikasi profesi, menengah dan menengah. perguruan tinggi dan lembaga pelatihan, lembaga atau badan akreditasi terlibat erat dalam memastikan KKNI yang andal dan komprehensif – penciptaan dana pembangunan. KKNI diatur melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012.

KKNI merupakan perwujudan kualitas dan jati diri bangsa Indonesia yang terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem evaluasi kesetaraan nasional yang harus dihasilkan Indonesia berdasarkan capaian pembelajaran sumber daya manusia yang dimiliki setiap warga negara Indonesia.

Prinsip dasar yang dikembangkan di KKNI adalah mengevaluasi aktivitas ilmiah, kompetensi, dan keterampilan seseorang sesuai dengan prestasi belajar.

Dalam proses pendidikan, hasil belajar adalah hasil akhir atau serangkaian proses peningkatan pengetahuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, atau informal. Dalam pengertian yang lebih luas, hasil belajar juga dipahami sebagai hasil akhir dari kualifikasi atau proses karir seseorang selama bekerja. Prinsip-prinsip dasar ini konsisten dengan pendekatan yang diambil negara-negara lain dalam mengembangkan kerangka kualifikasinya.

Dalam penyusunan konsep KKNI juga dilakukan studi banding ke berbagai negara, sehingga dimungkinkan untuk mengembangkan KKNI yang sebanding dengan kerangka acuan gelar di negara lain. Perbandingan KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain sangat penting agar KKNI dapat dipahami dan diakui sebagai sistem kualifikasi yang andal, dan dapat diandalkan. Selain itu, dengan pengakuan dan kepercayaan KKNI, maka akan lebih mudah dalam melaksanakan program kerja sama atau pemerataan lapangan kerja antara Indonesia dan negara lain.

Indonesia menganut sistem yang terpadu atau terintegrasi. KKNI memandang hasil pembelajaran pendidikan akademik, profesi, dan vokasi pada jenjang yang sama atau setara, bahkan dapat disamakan dengan hasil pembelajaran nonformal atau informal. Oleh karena itu, KKNI Indonesia disusun sebagai kerangka acuan tunggal gelar di seluruh bidang pendidikan dan dunia kerja.

KKNI harus dikembangkan sebagai kebijakan yang mempunyai makna luas di masyarakat, dengan langkah-langkah yang jelas dan mendorong semua orang untuk berpartisipasi pihak-pihak yang mengambil keputusan untuk mencapai hasil merupakan kesepakatan bersama. Implementasi KKNI diharapkan dapat :

- a) meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- b) meningkatkan pengakuan masyarakat pengaruh internasional terhadap hasil pendidikan nasional;
- c) meningkatkan kesadaran hasil pembelajaran nonformal dan informal pada sistem pendidikan formal; dan juga
- d) meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas dan pentingnya personel lapangan kerja yang diciptakan oleh sistem pendidikan nasional.

3. Sejarah Perkembangan

Globalisasi pada abad ini telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan seluruh masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Di era ini, pendidikan harus mampu merespon dan mengantisipasi liberalisasi pasar tenaga kerja dan pembangunan masyarakat berbasis pengetahuan. Oleh karena itu, metode dan model baru dikembangkan, pendidikan juga harus dikembangkan (UNESCO: 2006).

Mobilitas pelajar dan staf antar negara juga menghadirkan tantangan bagi dunia pendidikan ketika membandingkan kualitas antar negara.

Pada pertengahan tahun 1990-an, klasifikasi pekerjaan berkembang pesat sehingga tercipta keselarasan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil (kualifikasi) sebagai faktor yang sangat penting. Untuk kebutuhan pemasaran beberapa negara kemudian mengembangkan sistem yang menjelaskan keterampilan dan kualifikasi. Misalnya di Austria mereka membangun sistem yang disebut "AMSQualification-klassifikation", di Jerman sistem "Kompetenzenkatalog", di Perancis dikenal dengan "ROMO", di Amerika disebut "O*NET", di Swedia disebut "O*NET". disebut Taxonomy-DB dan di Eropa disebut "Job Mobility Portal".

Untuk mencegah globalisasi, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di berbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, lingkungan hidup dan pendidikan. Perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain GATS (General Agreement on Trade in Services - 5 April 1994), WTO (World Trade Organization - 1 Januari 1995), AFTA (ASEAN Free Trade Area - 1992), Regional Agreement dan Asia-Pacific Higher Pendidikan Kajian, Gelar dan Pengakuan Gelar (16 Desember 1983, kemudian dimutakhirkan 30 Januari 2008). Ruang lingkup konvensi internasional ini jelas menunjukkan perlunya masyarakat internasional memahami kualifikasi kehidupan kerja. Oleh karena itu, setiap negara yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut memerlukan sistem kualifikasi tenaga kerja yang dapat dipahami bersama, yang disebut kerangka kualifikasi. Kerangka Kualifikasi merupakan alat yang mengklasifikasikan kualifikasi seseorang berdasarkan kriteria yang berkaitan dengan tingkat hasil belajar.

Keberadaan kerangka kualifikasi nasional diharapkan dapat mendorong pembangunan, Keterampilan kerja mendorong mobilitas siswa dan karyawan serta meningkatkan akses seseorang terhadap pendidikan tinggi sepanjang hidup (Tuck, 2007: 2-3).

Kesetaraan sistem kualifikasi antara negara-negara yang berpartisipasi dalam perjanjian meningkatkan mobilitas, menciptakan pengakuan internasional yang setara atas ijazah atau sertifikat kualifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan memfasilitasi pertukaran murid, pelajar atau tenaga ahli.

Sejarah perkembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dimulai pada tahun 2005 ketika pemerintah Indonesia meluncurkan program reformasi pendidikan tinggi. KKNI adalah sistem yang mengatur kualifikasi pendidikan dan pelatihan di Indonesia berdasarkan tingkat, standar, dan bidang keahlian yang berlaku secara nasional.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum KKNI, yang menjadi landasan hukum bagi implementasi KKNI. Pada tahun yang sama, pemerintah juga membuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang menjadi dasar untuk pengembangan KKNI.

Sejak itu, KKNI terus mengalami perkembangan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pada tahun 2012, pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2012 tentang KKNI dalam Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Selain itu, KKNi juga terus disempurnakan melalui berbagai kerjasama antara pemerintah, lembaga akademis, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini, KKNi telah menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum, penilaian, dan pengakuan kompetensi di berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Dengan demikian, perkembangan KKNi telah membawa dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Indonesia serta memperkuat integrasi sistem pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komposisi Produktivitas Indonesia di kawasan Asia

Produktivitas Indonesia dalam kawasan Asia dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat kualifikasi tenaga kerja. KKNi memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengukur dan membandingkan kualifikasi tenaga kerja Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan Asia. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat daya saingnya dengan menyesuaikan kualifikasi tenaga kerja sesuai standar internasional.

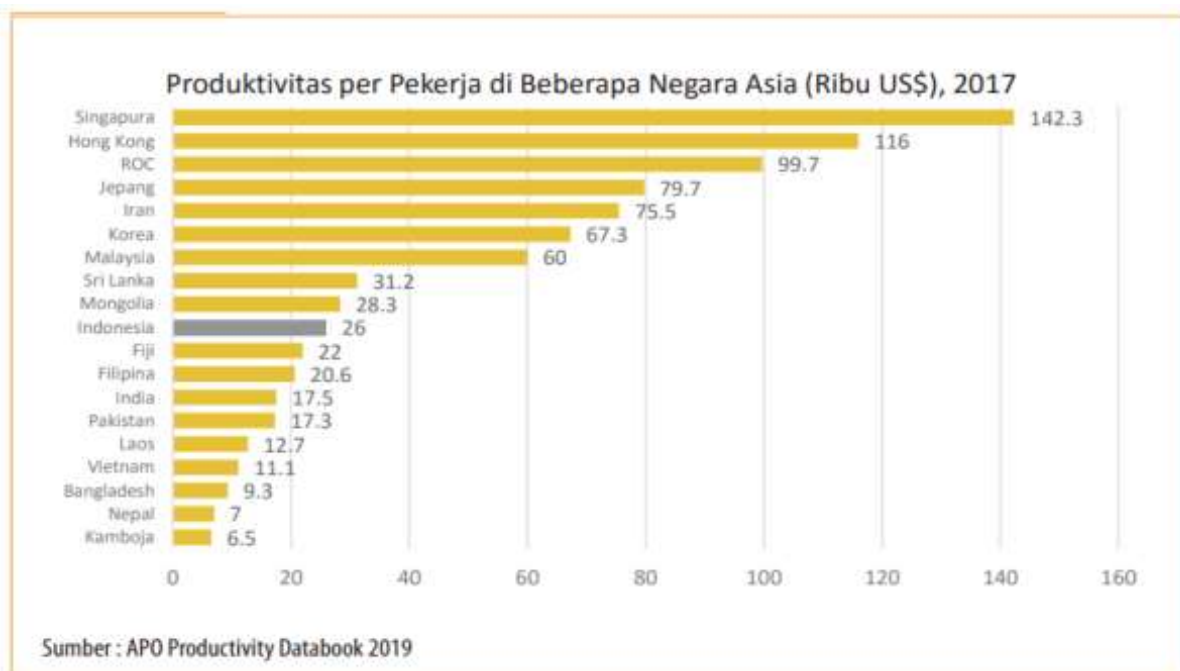
Dengan adopsi KKNi, produktivitas Indonesia dapat mengalami peningkatan karena adanya standar yang jelas untuk pengembangan kualifikasi tenaga kerja. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan tertentu dan mengarahkan upaya pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Komposisi produktivitas Indonesia di kawasan Asia sangat terkait dengan implementasi KKNi. Dengan adanya kerangka kualifikasi yang jelas, Indonesia dapat meningkatkan daya saing tenaga kerjanya di tingkat regional dan global.

Revolusi industri global kini telah memasuki generasi keempat. Sejak akhir Pada abad ke-18, revolusi industri terus berkembang. Pada generasi pertamanya, Revolusi industri berfokus pada penggantian penggunaan hewan dan manusia dengan penggunaan air/batubara/uap dan mesin. Substitusi ini meningkatkan output produksi dan meningkatkan produktivitas di beberapa sektor ekonomi, khususnya industri tekstil (Freeman dan Soete, 1997).

Pada abad ke-18, populasi manusia meningkat pesat. Pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan mempunyai dua dampak. Dampak pertama, pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, namun dampak lainnya adalah bertambahnya jumlah pekerja ketika kesempatan kerja terbatas (Klingenberg dan Antunes Jr, 2017).

Di kawasan ASEAN, laporan APO 2019 menunjukkan produktivitas tenaga kerja Indonesia menempati peringkat ke-3 naik satu tingkat dari tahun sebelumnya karena data produktivitas setiap pekerja Thailand belum tersedia di APO. Di antara 7 negara ASEAN yang tergabung dalam APO, Indonesia telah menaklukkan Filipina, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Sementara bersama dua negara ASEAN lainnya, Indonesia tertinggal Cukup jauh dari letak Singapura dan Malaysia masing-masing Urutan 1 dan 2. Produktivitas per pekerja Malaysia mencapai lebih banyak menggandakan kesuksesan Indonesia. Sedangkan produktivitas tenaga kerja Singapura mencapai hasil 5 kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

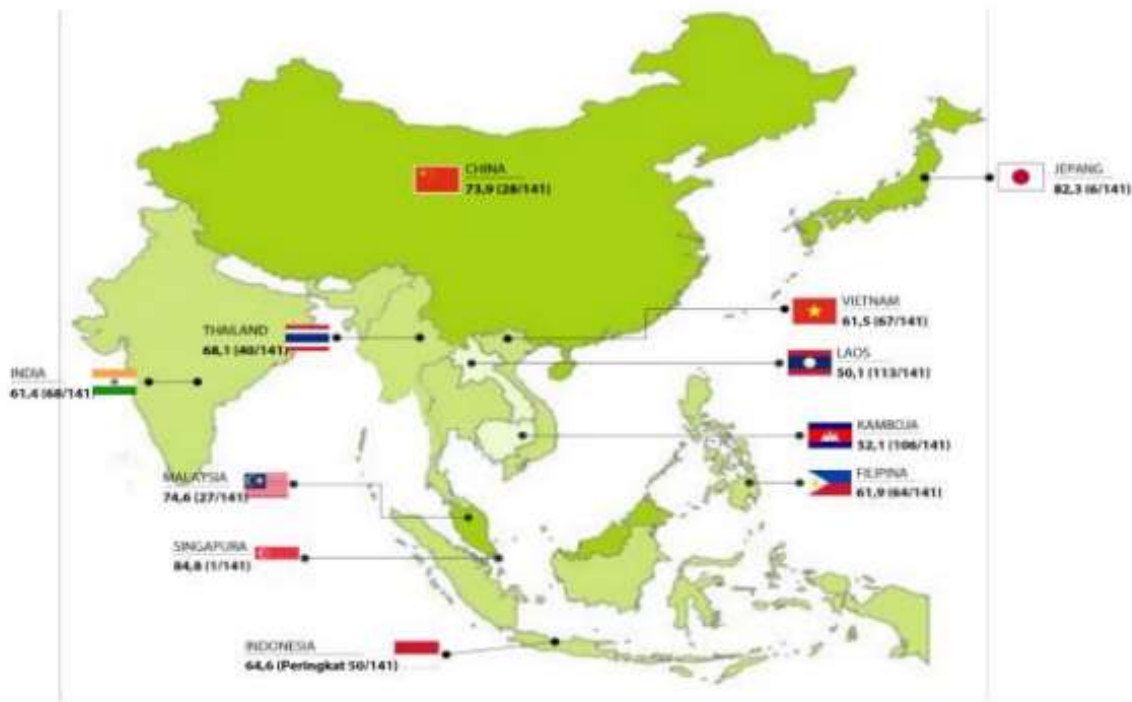


Gambar 1. Produktivitas Kerja di ASEAN



Gambar 2. Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia

Produktivitas tenaga kerja Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, tingkat pertumbuhannya berubah setiap tahunnya. Gambar 2 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia meningkat pesat pada tahun 2015, sebesar 4,96%, kemudian melambat pada tahun 2016. Pada tahun 2017, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia kembali meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2019 mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 3,56%.



Gambar 3. Daya Saing Indonesia Menurut World Economic Forum

Menurut WEF dalam Global Competitiveness Report 2019, skor kekuatan Daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,6 dan menduduki peringkat 50/141 negara yang disurvei. Peringkat daya saing Indonesia 2019 menurun dibandingkan tahun 2018, ketika menduduki peringkat 45/140 negara yang disurvei. Sementara itu, di antara 9 negara ASEAN yang diakui dalam GCI, daya saing Indonesia pada tahun 2019 menduduki peringkat ke-4.

2. Komposisi Struktur Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai komposisi struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sangat penting untuk memahami distribusi tenaga kerja dalam berbagai tingkat kualifikasi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka acuan untuk memahami dan menilai tingkat kualifikasi seseorang. Berdasarkan KKNI, struktur tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi empat tingkat pendidikan utama: 1) tidak lulus sekolah, 2) pendidikan menengah, 3) pendidikan tinggi, dan 4) pendidikan vokasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, komposisi struktur tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada Februari 2021 adalah sebagai berikut: 44,03% tidak lulus sekolah, 44,11% pendidikan menengah, 10,88% pendidikan tinggi, dan 1,98% pendidikan vokasi.

KKNI menawarkan sembilan jenjang kualifikasi, dimulai dari Level 1 sebagai kualifikasi terendah dan Level 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Tingkat 1-9 ditetapkan melalui kajian mendalam mengenai kondisi kerja di Indonesia dari sudut pandang produsen tenaga kerja (pendorong pasokan) dan pengguna (pendorong permintaan). Uraian masing-masing jenjang gelar juga disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi umum negara, meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,

perekonomian serta sektor-sektor yang menunjang kesejahteraan manusia seperti industri, pertanian, kesehatan, hukum, pembangunan dll dan aspek pembangunan. Jati diri bangsa tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, yaitu komitmen untuk terus mengakui keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

Pengklasifikasian kualifikasi KKNi yang jenjang kesembilan merupakan jenjang tertinggi, tidak berarti jenjang KKNi tertinggi lebih tinggi dari 7 jenjang kualifikasi yang diterapkan di Eropa (8 jenjang) dan Hongkong (7 jenjang) atau sebaliknya lebih rendah dibandingkan tingkat kualifikasi yang berlaku di Selandia Baru (10 tingkat). Hal ini lebih lanjut diartikan bahwa jenis gelar KKNi dirancang sedemikian rupa sehingga setiap jenjang gelar sesuai dengan kebutuhan bersama antara produsen dan pengguna lulusan, budaya pendidikan/pelatihan/kursus di Indonesia saat ini, dan gelar sarjana dari setiap jalur pendidikan yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, KKNi dapat dijadikan acuan bagi empat (4) pemangku kepentingan yang menggunakan pendekatan masing-masing untuk meningkatkan tingkat kompetensi. Misalnya, sektor pendidikan formal dapat menjadikan KKNi sebagai tolok ukur dalam perancangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga dapat dengan tepat menempatkan keterampilan lulusannya pada salah satu jenjang kualifikasi KKNi dan menilai kesesuaiannya dengan karir tingkat dunia kerja. Di sisi lain, KKNi juga dapat dihubungi oleh pengguna lulusan, asosiasi industri atau kehidupan kerja secara umum untuk menilai kualifikasi pencari kerja dan membimbing mereka menuju karir dan menawarkan remunerasi yang sesuai. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan pemerataan profesi di bidang serikat pekerja/serikat buruh. Di KKNi, pemangku kepentingan pada tingkat tertentu juga dikenal oleh kelompok masyarakat luas karena mempunyai pengalaman otodidak yang memenuhi atau sesuai dengan gambaran tingkat kualifikasi tertentu.



Gambar 4. Penjenjangan KKNi 4 Jejak Jalan (Pathways) serta kombinasi keempatnya

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh enam parameter utamayaitu (a) Ilmu pengetahuan (science), (b) pengetahuan (knowledge), (c) pengetahuan praktis(know-how), (d) keterampilan (skill), (e) afeksi (affection) dan (f) kompetensi (competency).Ke-enam parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor Kualifikasi.

3. Strategi Implementasi KKNI Secara Nasional

Pengelolaan strategis dan peningkatan kualitas tenaga kerja negara harus menjadi perhatian semua kelompok kepentingan, seperti industri dan perdagangan, lembaga negara dan non-negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas. Dalam situasi perekonomian negara yang jumlah pengangguran di dunia kerja masih cukup besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kualifikasi tenaga kerja dan pengangguran tersebut belum memadai dan tidak sesuai dengan kualifikasi KKNI. Gambar 1 di bawah menunjukkan secara skematis menggambarkan kondisi kerja saat ini dan dapat dijadikan pedoman dasar untuk menyusun strategi pelaksanaan KKNI. Gambar ini menunjukkan status tenaga kerja Indonesia dan kesesuaiannya dengan kualifikasi KKNI yang diharapkan sebagai berikut:



Gambar 5. Peran para stakeholder Tenaga Kerja Indonesia dalam Pengelolaan SDM Nasional

- (a) Pengangguran harus ditangani secara sistematis melalui kerja sama yang sinergis antara semua pihak yang bertanggung jawab, berdaya, dan peduli.

Tingkat Pendidikan 2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	2020	2021	2022
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3,61	3,61	3,59
SMP	6,46	6,45	5,95
SMA umum	9,86	9,09	8,57
SMA Kejuruan	13,55	11,13	9,42
Diploma I/II/III	8,08	5,87	4,59
Universitas	7,35	5,98	4,80

Gambar 6. Badan Pusat Statistik Survei angkatan kerja Nasional
Dimana, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

- b) Pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi KKNI, sehingga mutu dan kinerja yang dihasilkan tidak dapat diukur atau tidak memenuhi persyaratan pengguna karya, dapat menimbulkan permasalahan yang merugikan pekerja itu sendiri dan pengguna atau pemerintah dalam penyusunan strategi pengelolaan ketenagakerjaan nasional.

Tenaga kerja tersebut di atas harus mempersiapkan lembaga pendidikan formal, nonformal, nonformal, praktek swasta atau negeri, namun harus tetap berorientasi pada pencapaian tingkat kualifikasi sesuai KKNI. Dalam hal ini, badan yang berwenang, termasuk badan pengawasan mutu, harus dapat memastikan bahwa lembaga /pelatihan/kursus yang tersedia mempunyai mutu yang memadai dan dapat dipertimbangkan.

Singkatnya, strategi implementasi KKNI harus mampu mencerminkan beberapa permasalahan mengikuti:

- a. Menjadi bagian integral dari manajemen dan strategi perbaikan kualitas sumber daya manusia nasional;
- b. menjadi standar dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan nasional di bidang pendidikan umum dan khususnya pendidikan tinggi;
- c. bertindak sebagai panduan bagi industri, dunia usaha dan lembaga pemerintah perencanaan dan pengembangan karir;
- d. menjadi indikator arah dan acuan dalam pengembangan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan swasta dan negeri;
- e. menjadi pedoman bagi organisasi profesi dalam pengembangan tingkat pembangunan profesi; dan
- f. menjadi indikator perkembangan dunia kerja atau masyarakat luas

Idealnya, KKNI menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penghasil dan pengguna lapangan kerja serta masyarakat luas. Selain itu, di era mobilitas dan mobilitas tenaga kerja internasional, KKNI harus mampu menjadi panduan untuk melakukan harmonisasi kualifikasi tenaga kerja dari negara lain ke Indonesia dan sebaliknya.

Perpres tentang KKNI memberikan landasan hukum yang dapat mengikat sistem ketenagakerjaan dan mekanisme penyiapannya di wilayah hukum Indonesia.

Penyempurnaan regulasi dan konstruksi KKNI memberikan peluang untuk menata dan mempersiapkan serta meningkatkan daya saing lapangan kerja Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Namun efektivitas KKNI dalam kehidupan kerja sebagai tolok ukur utama penataan gelar tidak dapat dicapai hanya dengan mengeluarkan keputusan presiden. Penyelenggaraan KKNI yang efektif harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir. Implementasi berkualitas tinggi tersebut hanya mungkin terjadi jika ada lembaga khusus yang mampu melaksanakan implementasi KKNI secara utuh dan komprehensif. Nama lembaga ini mungkin Badan Pemeriksa Nasional Indonesia (BKNI).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka acuan yang digunakan untuk mengakui dan mengukur pencapaian kompetensi seseorang di Indonesia. Implementasi KKNI secara nasional memerlukan strategi yang terencana dengan baik agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Beberapa strategi implementasi KKNI di Indonesia meliputi :

1. Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI:

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya perlu mengembangkan kurikulum mereka berdasarkan KKNI untuk memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

2. Pelatihan Dosen dan Tenaga Pendidik:

Dosen dan tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatihan terkait implementasi KKNI agar dapat mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kerangka kualifikasi ini

3. Penyesuaian Sistem Penilaian:

Sistem penilaian di lembaga pendidikan perlu disesuaikan dengan KKNI, termasuk penggunaan standar penilaian yang relevan dengan kompetensi yang diukur.

4. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat:

Diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya KKNI agar mereka dapat mendukung implementasi ini dan memahami manfaatnya.

5. Kerjasama Stakeholder:

Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi KKNI secara efektif.

Dengan menerapkan strategi implementasi KKNI secara nasional, diharapkan bahwa Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global. Maka dari itu, implementasi KKNI memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

4. PerencanaanLMeningkatkan Kompetensi Berdasar acuan KKNI

Perencanaan peningkatan kompetensi berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan langkah penting dalam menghadapi tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks dan kompetitif. KKNI adalah sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang mengacu pada standar kompetensi kerja yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi. Dalam konteks perencanaan peningkatan

kompetensi berdasarkan KKNI, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, identifikasi kebutuhan pasar kerja dan industri untuk menentukan kompetensi yang harus ditingkatkan. Hal ini melibatkan analisis tren industri, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan konsumen.

Kedua, menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memastikan bahwa mereka mencakup kompetensi sesuai dengan level KKNI yang ditetapkan. Integrasi teknologi dan pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi strategi efektif dalam mencapai tujuan ini.

Ketiga, mengevaluasi dan memantau hasil dari perencanaan peningkatan kompetensi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sesuai dengan standar KKNI tercapai.

Melalui perencanaan yang baik, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta mampu berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, perencanaan peningkatan kompetensi berdasarkan KKNI menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi.

Keberadaan KKNI sebenarnya merupakan indikasi umum bagaimana kualifikasi seseorang diakui dalam kehidupan profesional. Kebutuhan Indonesia akan KKNI dalam waktu dekat sangatlah mendesak karena semakin besarnya tantangan dan persaingan global di pasar tenaga kerja nasional dan internasional, membuka Pergerakan pekerja dari dan ke Indonesia tidak bisa lagi dihentikan oleh aturan atau peraturan keselamatan. Agar Indonesia dapat bertahan dalam jangka pendek dan jangka panjang, namun tetap maju dalam kancha perekonomian global, pengakuan timbal balik dan setara dengan negara asing merupakan titik kritis dalam pengembangan kerangka kualifikasi tenaga kerja nasional KKNI memiliki tiga strategi pengembangan.

Yang terpenting, KKNI mengikuti strategi yang menyamakan kualifikasi seseorang yang diperoleh berdasarkan pembelajaran formal, non-formal, informal, dan pengalaman kerja. Kedua, KKNI mengakui kualifikasi lulusan yang bekerja atau melanjutkan studi di luar negeri, pertukaran tenaga ahli dan pelajar antar negara, atau pemegang gelar dari luar negeri yang bekerja di Indonesia. Ketiga, KKNI mengakui kesetaraan derajat hasil pembelajaran berbagai disiplin ilmu di tingkat universitas, pendidikan akademik, profesi, dan vokasi, serta melalui pengembangan karir yang dilakukan dalam kelompok kerja, industri, atau organisasi profesi.

Salah satu bentuk perubahan berasal dari gagasan yang diungkapkan dalam bentuk visi, misi, dan program yang terukur dan mengutamakan kebutuhan saat ini dan masa depan. Salah satu programnya Dirancang untuk kebutuhan pengguna sarjana dan pascasarjana Penerapan kurikulum berbasis KKNI dalam pengembangan kurikulum di setiap kurikulum. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan mutu klasifikasi lulusan perguruan tinggi Islam dengan kriteria kelayakan lulusan sesuai harapan pengguna (stakeholder). Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan tinggi terkait KKNI merupakan upaya yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi baik secara nasional maupun internasional. KKNI ini telah direncanakan sejak tahun 2014, oleh karena itu dalam

penerapan kurikulum KKNi perlu dilakukan investigasi dan evaluasi apakah kurikulum yang diberikan sudah dilaksanakan atau belum, kendala apa saja yang ditemui dan prestasi apa saja yang telah dicapai oleh siswa (siswa).

Dalam penerapan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia terdapat tiga tahapan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KKNi, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap perencanaan

Pada tahap saat ini, program studi telah disusun dan memenuhi persyaratan pihak yang berkepentingan perubahan kurikulum yang lebih berorientasi pada kepentingan lulusan (peserta didik) dibandingkan produksi dan pengguna, dalam hal ini masyarakat, industri dan birokrasi. Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa kegiatan yaitu pembentukan focus group, Keterlibatan guru/dosen ataupun pengajar dalam lingkungan kurikulum, workshop menghadirkan pakar kurikulum, sosialisasi hasil kepada tenaga pengajar dan dosen.

2. Tahap pelaksanaan

Langkah ini merupakan demonstrasi desain yang dibahas sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan program diskusi terfokus yang mengundang para ahli kurikulum untuk membahas makna perubahan kurikulum, dukungan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kurikulum Workshop juga dilakukan pada tahap ini, karena maksud atau tujuan workshop adalah menghasilkan dokumen tertulis tentang KKNi pendidikan.

3. Tahap evaluasi

Pada tahap ini ingin melihat apakah aspek yang direncanakan dan dilaksanakan sudah memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Pada tahap ini ingin memastikan bahwa seluruh perangkat yang terkait dengan pelaksanaan KKNi benar-benar siap digunakan. Terdapat perbedaan dalam kurikulum sebelumnya dengan KKNi, dimana kurikulum ini melengkapi kurikulum sebelumnya. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang menyoroti kebutuhan peserta didik, khususnya mengenai keterampilan apa yang mereka miliki setelah menyelesaikan beberapa gelar sarjana, master, dan doktor. Istilahnya masih luas dan umum, sehingga harus lebih fokus pada pencapaian kualifikasi tersebut, maka lahirlah KKNi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagai jawaban terhadap kebutuhan mahasiswa yang tujuannya pembelajarannya lebih berorientasi pada level 6. Implementasi kurikulum KKNi terkendala oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dosen masih belum bisa memahami isi dan struktur kurikulum, kurangnya sarana prasarana pendukung, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tidak mencukupi. Yang terpenting adalah kebijakan manajemen dalam pengambilan keputusan. KKNi sangat sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sebagai produk proses pendidikan tinggi. Mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan tertentu, namun juga kemampuan mempraktekannya di dunia kerja, sehingga setiap lulusan dapat diterima di masyarakat, birokrasi, dan industri.

5. Komposisi Struktur tenaga kerja Indonesia

Komposisi struktur tenaga kerja Indonesia terkait Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merujuk pada distribusi tenaga kerja berdasarkan tingkat kualifikasi yang dimiliki. KKNI merupakan kerangka kualifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengakui berbagai tingkat kualifikasi pendidikan dan pelatihan di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), komposisi struktur tenaga kerja Indonesia terkait KKNI terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu KKNI level 1-2, level 3-5, level 6, dan level 7. KKNI level 1-2 mencakup pekerja dengan kualifikasi rendah dan tidak terampil, seperti pekerja kasar dan buruh tani. Level 3-5 mencakup tenaga kerja terampil menengah, seperti operator mesin atau teknisi. Level 6 mencakup tenaga kerja terampil tinggi, seperti insinyur atau manajer. Sedangkan level 7 adalah tenaga kerja profesional dengan kualifikasi lanjutan, seperti dokter, profesor, atau arsitek.

Pegawai merupakan penduduk usia kerja. Pembatasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara. Batas usia kerja yang diterima di Indonesia adalah minimal 15 tahun dan tidak ada batasan usia. Angkatan kerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan non angkatan kerja. Angkatan kerja adalah angkatan kerja atau penduduk usia kerja atau usia kerja tetapi menganggur sementara dan sedang mencari pekerjaan.

Selain itu, angkatan kerja terbagi menjadi dua subsektor, yaitu bekerja dan menganggur. Karyawan adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, termasuk orang yang bekerja dan benar-benar bekerja, serta orang yang hanya mempunyai pekerjaan. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, termasuk orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan. Apabila tawaran pekerjaan dan tingkat suatu jenis pendidikan tertentu lebih besar daripada kebutuhan kelompok kerja yang bersangkutan, maka terjadilah pengangguran.

Pengangguran dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, maka tugas pemerintah adalah menyesuaikan rencana pembangunan untuk mengatasi masalah kesempatan kerja. Dengan demikian, jelas bahwa perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja.

Penduduk Bekerja dan Pengangguran	Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran					
	Penduduk Bekerja			Pengangguran		
	2022		2023	2022		2023
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
Persentase (%)	94.17	94.14	94.55	5.83	5.86	5.45
Jumlah (Ribuan orang)	135611.90	135296.71	138632.51	8402.15	8425.93	7989.28

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/6/1953/1/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>

Gambar 7. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran

Dapat dilihat dalam table bahwa tingkat penduduk bekerja di 2022 ke 2023 meningkat dari 94.14% di bulan agustus 2022 dan meningkat di 94.55% di 2023 itu artinya mayoritas penduduk di Indonesia memiliki pekerjaan dengan persentase diatas 90%. Untuk pengangguran ditahun 2022-2023 masih diatas 5% itu artinya masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan , dari data tersebut bias dirincikan sebagai berikut :

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2019		2020		2021		2022	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Tidak/belum pernah sekolah	36,422	40,771	35,761	31,379	20,461	23,905	24,852	15,206
2	Tidak/belum tamat SD	443,495	347,712	346,778	428,813	342,734	431,329	437,819	663,125
3	SD	965,641	865,778	1,006,744	1,410,537	1,219,494	1,393,492	1,230,914	1,274,153
4	SLTP	1,235,199	1,137,195	1,251,352	1,621,518	1,515,089	1,604,448	1,460,221	1,500,807
5	SLTA Umum/SMU	1,690,527	2,008,035	1,748,834	2,662,444	2,305,093	2,472,859	2,251,558	2,478,173
6	SLTA Kejuruan/SMK	1,397,281	1,739,625	1,443,522	2,326,599	2,089,137	2,111,338	1,876,661	1,661,492
7	Akademi/Diploma	274,377	218,954	267,583	305,261	254,457	216,024	235,359	159,490
8	Universitas	855,854	746,354	824,912	981,203	999,543	848,657	884,769	673,485
Total		6,898,796	7,104,424	6,925,486	9,767,754	8,746,008	9,102,052	8,402,153	8,425,931

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPStatistik

Gambar 8. Jumlah Pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan masih tinggi dengan total ditahun 2022 mencapai 8,425,931 orang , dapat diartikan bahwa pendidikan tidak menjamin memiliki pekerjaan tetapi bukan berarti pendidikan itu tidak penting, oleh karenanya peran pemerintah dalam program KKNI perlu diawasi dan ditingkatkan sebagai peningkatan kualitas mutu pendidikan dan penyetaraan mutu pendidikan baik nasional maupun Internasional agar dapat diserap oleh dunia kerja dibidang industry maupun usaha dan bersaing di kancah Internasional.

KESIMPULAN

KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) merupakan suatu kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. KKNI dianggap sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan, pelatihan kerja, dan penilaian kesetaraan capaian pembelajaran nasional. Prinsip dasar KKNI adalah mengevaluasi aktivitas ilmiah, kompetensi, dan keterampilan seseorang sesuai dengan prestasi belajar.

Dalam konteks pendidikan, hasil belajar dipahami sebagai akhir dari serangkaian proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. KKNI menjadi tolok ukur dalam perancangan sistem pendidikan tinggi di Indonesia, memungkinkan penempatan keterampilan lulusan pada jenjang kualifikasi KKNI dan penilaian kesesuaian dengan dunia kerja. Penggunaan KKNI dalam perencanaan SDM dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi khusus, merencanakan pelatihan sesuai standar kompetensi, dan berdampak positif pada peningkatan kualitas SDM.

Implementasi KKNI dalam perencanaan SDM membutuhkan komitmen dan investasi besar dari perusahaan. Pengukuran tingkat kompetensi karyawan dengan KKNI memungkinkan identifikasi kesenjangan kompetensi dan perencanaan program pengembangan yang sesuai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas dan kinerja karyawan. Mengintegrasikan KKNI dalam perencanaan SDM dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (2017). Panduan Umum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta: BNSP
- BPS. (2021). Statistik Tenaga Kerja Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/19/tenaga-kerja.html>
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Yunani, Windi (2016). *LPentingnya KKNI di era Pasar Bebas*. LJakarta: <https://duniadosen.com/kkni-dan-pasar-bebas/>.
- Santoso, Megawati dkk, Tim KKNI (2015).Kerangka Kualifikasi Nasional https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_001_dokumen_kkni.pdf . Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- .Santoso, Megawati dkk, Tim KKNI (2015).Kerangka Kualifikasi Nasional Direktorat Jendral https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_003_dokumen_strategi_implementasi_kkni.pdf . Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Masykur, R. Rosidin,Undang LIqbal, Agung M. (2018). *Implementasi Kurikulum KKNI Pada Program Studi Matematika UIN Raden Intan Lampung*. llLampung: 1 <https://doi.org/10.25217/numerical.v2i1.205>, lVol II.